

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan manusia, terdapat tahap yang disebut *emerging adulthood*, yaitu masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Menurut Arnett (2000), fase ini terjadi pada usia sekitar 18 hingga 25 tahun dan ditandai dengan proses individu mulai mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan dewasa. Pada fase ini, individu tengah berada dalam proses pencarian identitas dan eksplorasi berbagai kemungkinan hidup, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan interpersonal. Oleh karena itu, individu mulai membangun kemandirian, khususnya dalam konteks peran sosial, di mana individu telah melepaskan pola ketergantungan. Lebih lanjut, individu pada fase *emerging adulthood* umumnya tidak serta-merta memasuki dan secara menetap dalam peran-peran dewasa yang bersifat permanen. Sebaliknya, mereka cenderung memanfaatkan periode ini untuk mempelajari berbagai kemungkinan dan pengalaman hidup, dan secara bertahap menemukan arah yang lebih menetap dalam hal hubungan romantis ataupun dalam pemilihan karier (Arnett, 2007).

Di negara-negara berkembang terdapat kesenjangan budaya yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal pengalaman fase *emerging adulthood*. Individu yang berada pada fase *emerging adulthood* di wilayah perkotaan cenderung lebih banyak yang mengalami fase ini secara penuh, karena mereka menikah lebih lambat, memiliki anak lebih lambat, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, serta memiliki pilihan pekerjaan dan kesenangan yang jauh lebih beragam dibandingkan individu di wilayah pedesaan (Arnett, 2000). Secara perkembangan, fase ini sekaligus merupakan periode kritis di mana individu mulai dituntut untuk secara bertahap mengambil alih tanggung jawab atas kehidupannya sendiri, baik dalam menghadapi tantangan akademis maupun persoalan personal, sehingga kemampuan untuk mengelola berbagai aspek tersebut secara mandiri menjadi salah satu pencapaian perkembangan yang paling mendasar pada fase ini (McCoy dkk., 2024 dalam Ernawati dkk., 2026).

Wilayah Jabodetabek, sebagai kawasan metropolitan terbesar di Indonesia, menjadi konteks yang relevan untuk melihat bagaimana perempuan *emerging adulthood* menjalani fase ini. Sebagai pusat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, wilayah ini menghadirkan tuntutan sekaligus peluang yang lebih kompleks bagi perempuan muda dibanding wilayah non-metropolitan, baik dalam hal pilihan pendidikan, karier, maupun tekanan sosial terkait pernikahan dan kemandirian. Perempuan merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan, baik dalam peran, identitas, maupun kondisi psikologisnya. Seiring dengan perkembangan zaman, perempuan dihadapkan pada tuntutan untuk semakin mandiri, berdaya, dan mampu mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri. Data BPS DKI Jakarta (2025) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 47,47% menjadi 50,24%, menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam lingkungan kerja mulai semakin setara dengan laki-laki. Namun demikian, peningkatan partisipasi kerja secara kuantitatif tidak selalu berbanding lurus dengan kemandirian secara psikologis.

Steinberg (2002) mengungkapkan bahwa kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertindak laku secara seorang diri, yang tercermin dari kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri, berperilaku sesuai dengan keinginan dan pertimbangannya, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Lebih dari itu, kemandirian juga menjadi salah satu syarat yang menandai kedewasaan seseorang sekaligus menjadi faktor penting dalam memperoleh pengakuan dari lingkungan sosialnya (Steinberg, 2002 ; dalam Hasmalawati & Hasnati, 2018). Namun, dalam kenyataannya banyak perempuan mengalami ketergantungan yang dipengaruhi oleh rasa takut. Kondisi ini dapat membuat mereka merendahkan diri sendiri, kurang mandiri dan menghabiskan banyak energi untuk mencari kasih sayang, perlindungan, serta dukungan ketika menghadapi berbagai masalah.

Kemandirian dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk bertindak laku secara mandiri sebagai bagian dari pencapaian otonomi diri (Steinberg & Lerner, 2009), kemandirian ini tercapai melalui tiga aspek, yaitu kemandirian emosi, kemandirian perilaku, dan kemandirian nilai. Individu yang

mandiri secara emosi mampu mengatasi persoalannya sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada orang tua saat merasa khawatir atau membutuhkan bantuan, sedangkan individu yang belum mandiri cenderung segera mencari validasi orang tua begitu menghadapi tekanan perasaan. Individu yang mandiri secara perilaku berani menentukan pilihannya sendiri, misalnya dalam memilih jurusan atau mengatur kehidupan sehari-hari, tanpa menunggu persetujuan orang lain, sedangkan individu yang belum mandiri cenderung ragu bertindak sebelum mendapat izin dari figur otoritas. Sementara itu, individu yang mandiri secara nilai mampu merumuskan sendiri prinsip benar-salah dalam ranah moral, politik, maupun agama berdasarkan refleksinya sendiri, sedangkan individu yang belum mandiri cenderung sekadar mengikuti pandangan orang tua atau lingkungan tanpa memaknainya secara pribadi (Steinberg, 2002).

Kemandirian dalam penelitian ini tidak dipahami secara sederhana sebagai kemampuan untuk hidup sendiri atau memenuhi kebutuhan secara mandiri, melainkan sebagai kapasitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bergamin dkk., (2024) mengonseptualisasikan kemandirian atau otonomi sebagai perpaduan antara autentisitas gagasan yang benar-benar berasal dari diri sendiri tentang bagaimana seseorang ingin menjalani hidupnya, termasuk kebebasan dari tekanan eksternal maupun kendali atas keinginan yang bertentangan dengan nilai pribadi dan kompetensinya, yaitu kemampuan untuk benar-benar bertindak dan mewujudkan tujuan hidup tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dikatakan mandiri hanya karena mampu bertindak secara independen, namun individu tersebut juga harus benar-benar meyakini dan mendukung nilai-nilai yang mendasari tindakannya.

Otonomi atau kemandirian perempuan merupakan isu krusial dalam masyarakat yang masih didominasi oleh permasalahan patriarki, di mana perempuan masih kerap dipandang sebagai pihak yang berada di bawah dominasi sehingga belum diakui sebagai individu yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan (Yolanda dkk., 2026). Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks kehidupan di wilayah urban. Meskipun memiliki akses yang lebih terbuka terhadap sumber daya dan karier, perempuan urban tetap rentan dihadapkan pada tekanan peran ganda, bias gender, serta ekspektasi sosial akibat

struktur kapitalisme bersamaan dengan adanya norma patriarki. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan hambatan simbolik dan emosional yang membatasi interaksi sosial mereka, sehingga upaya perempuan perkotaan untuk mencapai otonomi atau kemandirian penuh menjadi tantangan yang sangat kompleks (Evans, 2014; Heschaefer & Fan, 2024; Reichlin & Shaw, 2015, dalam Yolanda dkk., 2026).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyonaluri dkk., (2021) menunjukkan adanya keterbatasan otonomi perempuan akibat norma gender yang ditemukan secara empiris di kawasan Jakarta. Penelitian yang dilakukan terhadap populasi laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 40 tahun di kawasan Jakarta dan Surabaya menemukan bahwa norma gender yang terinternalisasi turut memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja. Norma gender yang terbentuk di ranah domestik ini saling memengaruhi dengan nilai-nilai gender yang berlaku di masyarakat secara luas, yang pada beberapa kasus tergambarkan di lingkungan kerja, contohnya dapat ditemukan dalam pembagian pekerjaan berdasarkan gender dan ketidaksetaraan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki. Studi ini juga mengungkap bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan sama-sama meyakini bahwa pekerjaan perempuan di luar rumah bersifat sekunder dan harus tetap fleksibel, sehingga perempuan tidak terkendala dalam menjalankan peran utamanya di ranah domestik (Setyonaluri dkk., 2021).

Tantangan kemandirian perempuan di ruang perkotaan turut ditemukan dalam penelitian yang dilakukan langsung di Jakarta (Purnamasari dkk., 2025). Fenomena ini turut dikonfirmasi oleh sebuah penelitian fenomenologis terhadap perempuan pekerja di kawasan Sudirman dan Kuningan, Jakarta, yang menemukan bahwa struktur kehidupan urban yang digerakkan oleh sistem kapitalisme, berpadu dengan norma-norma patriarki yang masih mengakar, turut membatasi ruang gerak dan interaksi sosial perempuan. Meski dihadapkan pada keterbatasan tersebut, perempuan tetap menunjukkan upaya aktif untuk mempertahankan kemandiriannya. Perempuan tetap mengadopsi strategi adaptif meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, khususnya dengan merebut kembali ruang fisik multifungsi serta memperluas kehadiran mereka ke ruang digital, seperti media sosial, forum daring, dan *platform* pesan instan, guna membangun solidaritas dan pertumbuhan profesional. Namun demikian, hambatan struktural seperti dominasi

ruang komersial, minimnya ruang publik yang aman, serta pembatasan mobilitas berbasis gender, tetap menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai kemandirian secara utuh.

Dapat dilihat bahwa meski perempuan di Jakarta memiliki akses terhadap ruang dan peluang perkotaan yang lebih terbuka dibanding wilayah non-urban, kesenjangan struktural dan kultural tetap menghambat tercapainya kesetaraan gender, di mana diskriminasi terhadap perempuan masih terlihat melalui beban kerja ganda, marginalisasi di sektor informal, serta faktor budaya yang memperkuat stereotip dan peran tradisional perempuan dalam masyarakat urban (Octoberi dkk., 2025). Beban peran ganda ini bahkan tetap dirasakan perempuan meski telah menjalani peran produktif di ranah publik, sebagaimana tergambar dari kondisi perempuan generasi *sandwich* di Jabodetabek yang harus menyeimbangkan pekerjaan dengan tanggung jawab domestik dan pengasuhan, sementara di sisi lain tetap dituntut mampu mengelola dirinya secara mandiri, baik secara emosional, finansial, maupun dalam pengambilan keputusan hidup (Yustina & Ariela, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk mandiri pada perempuan urban justru berdampingan dengan beban peran yang dapat menghambat perkembangan kemandirian itu sendiri, mulai dari tekanan sistem kapitalistik kota hingga norma gender yang masih mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan ini pada akhirnya mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana kemandirian perempuan sesungguhnya terbentuk sejak awal kehidupannya. Kesenjangan kemandirian antara laki-laki dan perempuan turut tercermin dalam pola sosialisasi sejak kecil, di mana Hasmalawati dan Hasanati (2018) menemukan bahwa kemandirian pada perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini bukan bersifat bawaan, melainkan hasil dari pola asuh yang berbeda, di mana anak laki-laki lebih sering diberi kesempatan untuk berdiri sendiri dan mengambil risiko, sementara anak perempuan lebih diarahkan untuk menghindari konflik sehingga memperoleh ruang yang lebih sempit untuk mengembangkan otonominya. Dengan demikian, tantangan kemandirian perempuan tidak hanya berasal dari tekanan struktural di ruang publik, tetapi juga berakar dari proses pembentukan diri yang telah berlangsung sejak masa kanak-kanak.

Pola ini diperkuat oleh temuan Febriani dan Iswinarti (2025) dalam tinjauan sistematis terhadap studi-studi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kemandirian perempuan dewasa awal cenderung berkembang secara reaktif dan tidak merata. Kemandirian praktis, seperti mengurus kebutuhan sehari-hari atau mengambil keputusan kecil bisa tampak baik di permukaan, namun kemandirian emosional tetap rapuh karena minimnya bimbingan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan rasa aman sejak masa perkembangan awal. Tuntutan hidup mandiri bagi perempuan di Jakarta sering kali tidak lahir dari pilihan bebas, melainkan didorong oleh kebutuhan struktural yang terlihat dari keseharian perempuan pekerja urban yang harus menjalani peran ganda sekaligus. Sebagaimana dilaporkan Kompas.id (2026), banyak perempuan bekerja bukan karena dorongan aktualisasi diri semata, melainkan karena penghasilan pasangan tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup di kota besar, sehingga kemandirian ekonomi menjadi keharusan, bukan pilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan dituntut untuk mandiri, namun tidak diimbangi dengan berkurangnya tanggung jawab di ranah lain.

Kemandirian perempuan, termasuk kemandirian finansial, tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi kawasan tempat mereka tinggal. Meskipun Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan dengan perkembangan ekonomi yang pesat, tingkat kemiskinan di wilayah ini tercatat relatif stagnan di angka sekitar 6% sejak awal tahun 2000-an, dengan profil kemiskinan yang berbeda secara signifikan dari profil nasional, terutama dalam hal capaian pendidikan, sektor pekerjaan, dan status pekerjaan (Marlina dkk., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi suatu kawasan urban tidak serta-merta menjamin tercapainya kesejahteraan maupun kemandirian ekonomi individu di dalamnya, termasuk kemandirian finansial pada perempuan. Arnett (2000) menegaskan bahwa kemandirian finansial merupakan salah satu dari tiga kriteria utama yang dinilai penting oleh individu pada fase *emerging adulthood* untuk dapat dikategorikan sebagai individu dewasa, di samping kemampuan menerima tanggung jawab atas diri sendiri dan mengambil keputusan secara independen. Arnett (2007) menjelaskan bahwa kemandirian finansial ini tercermin dari perilaku nyata seperti telah memiliki pekerjaan yang stabil, tidak lagi bergantung secara finansial pada orang tua, serta tidak lagi tinggal di rumah orang tua.

Dengan demikian, banyaknya peluang yang tersedia di wilayah urban seperti Jabodetabek tidak serta-merta menjamin berkembangnya kemandirian yang utuh pada perempuan. Meskipun tampak mandiri dalam mengelola pekerjaan, finansial, dan kehidupan sehari-hari, sebagian perempuan masih menghadapi kerentanan emosional akibat kemandirian psikologis yang belum berkembang secara optimal. Kesenjangan antara kemandirian fungsional dan kemandirian psikologis inilah yang menjadi fokus penting untuk dikaji dalam penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Banyaknya peluang yang tersedia di wilayah urban Jabodetabek seperti akses pendidikan tinggi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang beragam, mobilitas sosial yang tinggi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak menjamin berkembangnya kemandirian yang utuh pada perempuan *emerging adulthood*, di mana kemandirian yang tampak tinggi secara fungsional belum tentu diiringi oleh perkembangan kemandirian psikologis yang setara.
- b. Kemandirian individu tidak berkembang secara merata pada seluruh aspeknya, karena aspek yang lebih dipengaruhi oleh kondisi emosional dan tekanan eksternal cenderung tertinggal dibandingkan aspek lainnya. Kondisi ini diperkuat oleh tekanan struktural seperti norma gender dan tuntutan kehidupan perkotaan, yang masih membatasi kebebasan perempuan untuk bertindak sesuai keinginan dan nilai pribadinya.
- c. Kesenjangan antara kemandirian fungsional dan kemandirian psikologis inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengingat kajian yang secara spesifik memetakan gambaran kemandirian pada perempuan *emerging adulthood* di kawasan Jabodetabek masih terbatas.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan fokus untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kemandirian pada perempuan *emerging adulthood* di wilayah Jabodetabek. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert yang disesuaikan dengan konteks perempuan *emerging adulthood* serta kompleksitas kehidupan di wilayah urban Jabodetabek. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kemandirian perempuan namun berada di luar fokus pengukuran variabel penelitian, seperti pola asuh orang tua, norma gender di lingkungan kerja, pengalaman *fatherless*, maupun tekanan struktural-ekonomi keluarga. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan fokus dan kedalaman analisis yang sesuai dengan tujuan awal dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu memetakan gambaran tingkat kemandirian itu sendiri, bukan menguji faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut "Bagaimana gambaran kemandirian pada perempuan *emerging adulthood* di Jabodetabek?"

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dilakukan dalam penelitian studi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran kemandirian pada perempuan *emerging adulthood* di Jabodetabek.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai gambaran kemandirian pada perempuan *emerging adulthood*, serta

menjadi landasan dalam merumuskan intervensi psikologis untuk mengembangkan kemandirian bagi perempuan dalam konteks sosial urban di Jabodetabek.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi, terutama dalam bidang psikologi perkembangan dan sosial, dengan menyoroti gambaran kemandirian pada perempuan di Jabodetabek, sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai proses pencapaian otonomi psikologis dalam masa transisi menuju dewasa.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena psikologis pada perempuan *emerging adulthood*, khususnya terkait kemandirian, dalam konteks masyarakat dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi diri untuk mengenali dimensi kemandirian yang sudah berkembang optimal maupun yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi integrasi diri, keterlibatan dengan hidup, ketertujuan pada tujuan, kontrol diri, kemampuan menghadapi batasan eksternal, maupun pemanfaatan dukungan sosial secara sehat.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan kemandirian perempuan serta dalam mengurangi stereotip gender yang membatasi ruang perempuan untuk bersikap mandiri, sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung perempuan untuk berkembang secara mandiri dan optimal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi kemandirian perempuan, serta dapat dikembangkan dengan metode pengumpulan data yang lebih mendalam.